

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI LAGOI  
OLEH INVESTOR ASING TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:  
**HENI ARI PUTRANTI**  
**L2D 097 445**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

## ABSTRAKSI

Pariwisata selalu dipandang sebagai sektor penting dalam pembangunan wilayah karena mampu memberikan stimulasi positif dalam pertumbuhan perekonomian dan perbaikan kehidupan sosial, terutama pada daerah sekitar obyek wisata dan pada wilayah dalam lingkup yang lebih luas. Aktivitas pariwisata selalu memiliki pengaruh/dampak (effects) terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik secara ekonomis yang dapat dinyatakan oleh angka (quantifiable) maupun segi sosial budaya dan lingkungan yang tidak bisa dinyatakan dengan angka (non-quantifiable). Dampak-dampak tersebut dapat menguntungkan sehingga perlu dilipatgandakan dan dapat pula merugikan sehingga sebisa mungkin dihindari atau dibatasi. Kabupaten Kepulauan Riau memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lain yaitu karena letaknya berdekatan dengan salah satu negara Asia yang menjadi tujuan utama wisata dunia yaitu Singapura dan memiliki kawasan pantai berpasir putih dengan keindahan alamiah yang didukung dengan adanya kebijakan pengelolaan kawasan pantai tersebut oleh investor asing, dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan khusus dari pemerintah pusat untuk pihak investor berupa kemudahan birokrasi perijinan dan pembebasan bea masuk untuk barang modal. Namun ternyata kebijakan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baik terhadap masyarakat setempat maupun pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau.

Dirasakan perlunya studi yang bertujuan untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pantai Lagoi oleh investor asing terhadap masyarakat setempat (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan) dan terhadap pemerintah daerah dalam hal ini PAD Kabupaten Kepulauan Riau.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Delphi dengan pertimbangan keterbatasan data, waktu, biaya dan lokasi penelitian yang cukup jauh. Metode Delphi dilakukan dalam 4 (empat) tahapan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pantai Lagoi menyebabkan terjadinya dampak positif dan negatif yang berimbang. Dampak positif terutama terhadap PAD karena terbukti merupakan sumber utama selama 5 (lima) tahun terakhir dengan kontribusi diatas 60% bahkan pernah mencapai 81% pada tahun 2000. Selain itu dampak positif terhadap fisik lingkungan berupa peningkatan kualitas lingkungan serta dapat menghalangi terjadinya degradasi lingkungan akibat penambangan pasir laut. Dampak negatif terutama dirasakan pada sektor ekonomi, dimana proses multiplier tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya eksklusivitas kawasan. Selain itu juga dirasakan pada aspek sosial budaya masyarakat setempat. Dimana yang utama adalah tersingkirnya masyarakat karena kualitas SDM lokal tidak mampu bersaing dengan pendatang yang memiliki skill yang lebih tinggi.

Penanggulangan terhadap dampak-dampak tersebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah yang harus didukung oleh peranserta aktif dari masyarakat lokal tentunya. Penanganan terhadap berbagai dampak tersebut tidak bisa dilakukan secara sektoral, karena terlihat adanya keterkaitan antara dampak yang saling mempengaruhi, sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan secara komprehensif. Beberapa alternatif penanganan melibatkan peran serta aktif masyarakat antara lain: mendirikan diklat-diklat pariwisata, menggalakkan home industry, kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal, Pengendalian Inflasi oleh pemerintah, pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata, menjaga stabilitas wilayah dan pengembangan wisata pendukung.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata selalu dipandang sebagai sektor penting dalam pembangunan wilayah karena terbukti mampu memberikan stimulasi positif dalam pertumbuhan perekonomian dan perbaikan kehidupan sosial, terutama pada daerah sekitar obyek wisata dan pada wilayah dalam lingkup yang lebih luas.

Ada tiga alasan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik lokal, regional maupun lingkup nasional. Alasan pertama selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Kedua untuk pelestarian dan pengembangan obyek wisata. Dan ketiga dengan pariwisata akan membuka wawasan masyarakat setempat, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat setempat (Yoeti,1997:33-35).

Aktivitas pariwisata selalu memiliki pengaruh/dampak (*effects*) terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik secara ekonomis yang dapat dinyatakan oleh angka (*quantifiable*) maupun segi sosial budaya dan lingkungan yang tidak bisa dinyatakan dengan angka (*non-quantifiable*). Dampak-dampak tersebut dapat menguntungkan sehingga perlu dilipatgandakan dan dapat pula merugikan sehingga sebisa mungkin dihindari atau dibatasi.

Dampak pariwisata yang menguntungkan dirangkum menjadi lima butir oleh John M. Bryden,1973 (dalam Pitariningtyas) sebagai berikut:

1. Menyumbang kepada neraca pembayaran dengan menghasilkan valuta asing.
2. Menyebarkan pembangunan ke daerah non industri.
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Dampak penggandaan pembangunan ekonomi (*multiplier effect*).

5. Pandangan masyarakat terhadap permasalahan yang timbul di dunia lebih terbuka karena mereka sudah lebih mengenal dan memahami orang asing (pemikiran dan seleranya).

Pariwisata menimbulkan rangsangan yang saling mempengaruhi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai segi kehidupan dan tatanan masyarakat setempat akibat adanya kontak dan interaksi antara masyarakat dan wisatawan. Dampak yang sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat dapat diamati pada sektor ekonomi dan sosial budaya dan fisik lingkungan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal ini Pulau Bintan terletak berdekatan dengan salah satu negara Asia yang menjadi tujuan utama wisata dunia yaitu Singapura. Secara geografis menguntungkan karena dapat dicapai dalam waktu yang relatif cepat, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke Singapura untuk singah ke Pulau Bintan.

Pulau Bintan memiliki sumber daya alam berupa pantai berpasir putih yang terbentang sepanjang  $\pm$  105 km di sisi utara pulau yang langsung menghadap laut Cina Selatan. Kawasan yang lebih dikenal sebagai kawasan Pantai Lagoi tersebut bila dikelola dengan baik akan menjadi alternatif tempat wisata yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kondisi yang demikian juga disadari oleh Pemerintah Singapura yang menghadapi masalah kejenuhan wisatawan karena dihadapkan pada obyek yang sama, sementara Singapura tidak memiliki cukup sumber daya alam untuk ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke Singapura.

Melihat keunggulan diatas dan dilandasi oleh pengertian saling menguntungkan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dicapai satu kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan kawasan Pantai Lagoi atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *Bintan Beach International Resort*.

Untuk memperkuat kesepakatan diwujudkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditandatangani oleh menteri terkait dari kedua negara dan disaksikan oleh kepala negara, pada tanggal 28 Agustus 1990 di Batam. Kerjasama tersebut meliputi pengembangan pariwisata di Lagoi (Pulau Bintan), kawasan industri Lobam (Pulau Bintan), Kawasan Industri maritim (Kepulauan Karimun) dan pengembangan sumber air (Pulau Bintan). Realisasi kerjasama tersebut didasari pada filosofi yang saling melengkapi.

Singapura yang dipandang sebagai *engine of growth* di kawasan Asia Tenggara memiliki kelebihan dari sisi modal, penguasaan teknologi tinggi, kemampuan managerial, dan kelengkapan infrastruktur. Namun lemah dalam hal persediaan sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja. Indonesia dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Riau dan Karimun memiliki SDA dan dapat menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL I.1**  
**FILOSOFI KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA**

<b>Singapura</b>	<b>Indonesia (Kep. Riau dan Karimun)</b>
Kelebihan: 1. Memiliki <i>Global Infrastructure</i> . 2. Memiliki <i>managerial Skill</i> yang tinggi. 3. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi. 4. Penguasaan Modal dan kepercayaan investasi dunia.  Kekurangan: 1. SDA, lahan dan persediaan air. 2. Tenaga kerja.	Kelebihan: 1. SDA, lahan, dan keindahan alam. 2. Tenaga kerja. 3. Kebudayaan. 4. Pengalaman membangaun. 5. Stabilitas (pada saat penandatanganan MOU).  Kekurangan: 1. Modal dan <i>managerial skill</i> . 2. <i>World wide trust of invesment</i> .

Sumber: TKPPR 1996

Selanjutnya disetujui pengelolaan kawasan oleh investor asing, dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan khusus dari pemerintah pusat untuk pihak investor berupa kemudahan birokrasi perijinan dan pembebasan bea masuk untuk barang modal. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pantai Lagoi terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu *pre development* meliputi masa perumusan kebijakan (-1990) dan pembebasan lahan (1991-1993/1996), *development* (1994-1996) dan *operational* (1996-sekarang).